BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat. Hal ini karna adanya ketentuan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang di kelolah pemerintah, sehingga munculkan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan mempunyai tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, Manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang di lakukan pemerintah merupakan wujudan dari penyedia informasi mengenai dari setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial seperti perancangan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah.

Akuntansi Pemerintah tidak hanya di terapkan dipemerintah pusat, namun juga tingkat daerah sampai daerah pendesaan yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar khususnya untuk daerah pendesaan. Dalam perkembangannya, kini desa berkembang menjadi beberapa bentuk yang di berdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan yang terkecil dipimpin oleh Kepala Desa oleh sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai Dasar hukum yang mengatur yang dianggap urgen bagi desa. Secara depinitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka di perlukan dukungan sumber daya, baik personil, dana, maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP No.72 Tahun 2005 tersebut telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka pemberian pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan hasil daerah, adanya kewajiban dari pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk dari transfer dari dana pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di tetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang di terima masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menurut asas

otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberian otonomi luas kepada daerah di harapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tingkat keadilan dan kepatuhan,serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa,tersedianya dana yang cukup. Oleh karna itu, muncul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan dana yang di terima oleh kabupaten atau kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proposional yang di sebut dengan Alokasi Dana Desa (di singkat ADD).

Menurut Pemerdesa No. 05 Tahun 2015. ADD sebagai bantuan dana merangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Selain itu terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2015 menjelaskan desa adalah adat atau yang di sebut dengan nama lain ,disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap penyelewangan dana oleh pihak yang sebenarnya bisa di percaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat

sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana selalu monitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari alokasi dana desa yang diperuntukkan bagi pemerdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Alokasi Dana Desa digunakan untuk pemerdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi sarana publik, perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa serta kegiatan lainnya yang dianggap penting.

Dalam Peraturan pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang asas perubahan peraturan Dana Desa, Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Rencana penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa dimusyawarkan dengan badan pemusyawaratan Desa (BPD), perangkat Desa , PKK Desa, Ketua RW, dan Ketua RT sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No 06 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak di susun oleh kepala Desa, Seketaris Desa, Bendahara Desa dan Perangkat desa. Kegiatan dalam bantuan Alokasi Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak di tangani oleh Kepala Desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, perlu juga aspek tata pemerintahan yang baik (*good Governance*). Dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat,

sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good goevenance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang di bangun atas dasar informasi yang bebas dan informasi yang perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi, transparansi dan akuntabilitas adalah dua kanta kunci dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Goevernance*). Transparansi di tandai oleh kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan terbuka pada publik.sesuai dengan pembedagri Nomor 113 Tahun 2014.yaitu:

“Memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”

Menurut Mardiasmo (2005:30) Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada bab 2 pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Perrnendagri No.113 tahun 2014, keuangan desa dikelola

berdasarkan asas-asas Transparansi, Akuntabel, Partisipatif yang dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur dari baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Menurut Mahmudi (2007:9) Akuntabilitas adalah kewajiban agen untuk mengelola Sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Musi Banyuasin di dasarkan pada realita sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini pada tahap keterbukaan dan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakannya dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada musyawarah pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas mendengar. Pada tahap wawancara pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di hadirkan hanya orang-orang tertentu saja, sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tidak terbuka dan

tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum, sehingga masyarakat tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD. Dengan demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung kurang berpartisipasi pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat Transparansi dan Akuntabilitas dalam mengelola keuangan seperti Farida (2015), Deti Kumala Sari (2015), Arista Widiyanti (2017), Rina widyanti(2018). Dengan adanya penelitian di atas peneliti berusaha menguji tingkat Transparansi dan Akuntabilitas desa dalam mengelolah keuangan desa agar tidak menimbulkan opini masyarakat pada kegiatan alokasi dana desa (ADD) tersebut seperti tindakan korupsi yang dilakukan perangkat desa. Dengan menggunakan objek penelitian, yaitu Kepala Desa, perangkat Desa dan Masyarakat yang ada di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya dengan menggunakan tahap Keterbukaan, perencanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan ADD Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SINAR TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN"** .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bagaimana Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam pembahasan pokok permasalahan lebih fokus, maka penulis memberi batasan terhadap pembahasan yang akan dilakukan yaitu analisis transparansi dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya berdasarkan laporan data kualitatif Tahun 2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Mengetahui Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4.2 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilaksanakan penulis pada Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

a. Bagi Pemerintah Desa

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggung jawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD khususnya di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan ADD.

c. Bagi Masyarakat Desa

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini di bagi menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan kerangka pemikiran, terdiri dari telaah teori, landasan teori penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran serta teori-teori yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa (ADD).

BAB 3 OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN

Obyek penelitian, metode penelitian, operasional variabel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB 4 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian meliputi deskripsi wilayah penelitian, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas pembahasan yang dilakukan oleh bab sebelumnya dan memberikan saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam penulisan ini.